

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan daya saing nasional, terutama di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan kompeten semakin meningkat. Di Indonesia, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan kebutuhan dunia industri.

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap kerja dan relevan dengan kebutuhan industri. Namun, kesenjangan antara kompetensi lulusan Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia. Pendidikan vokasi, atau sering disebut pendidikan kejuruan, adalah jenis pendidikan yang fokus pada penguasaan keterampilan terapan dan persiapan langsung untuk karir tertentu. Tujuan utama dari pendidikan vokasi adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk bekerja di industri tertentu, sehingga lulusan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan *link and match* yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi pendidikan vokasi serta mempersiapkan lulusan yang siap kerja.

Upaya menyelaraskan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terdidik dengan dunia kerja dilakukan melalui program *link and match*. Program ini pertama kali digagas pada tahun 1993 oleh Menteri Pendidikan Prof. Dr. Ing. Wardiman (1993-1998). Salah satu bentuk implementasi dari program ini adalah pengalaman kerja di instansi bisnis maupun pemerintahan. Tujuan dari pengalaman kerja ini adalah agar calon lulusan memiliki pengalaman langsung di lingkungan kerja sebelum resmi menjadi alumni, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan mereka dapat langsung bekerja. Namun, dalam praktiknya, tidak semua peserta magang maupun institusi pendidikan mendapatkan manfaat langsung dari program pengalaman kerja ini. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu magang serta kewajiban

peserta untuk tetap menyelesaikan materi pembelajaran selama magang, sehingga mereka masih harus mengerjakan tugas akademik. Selain itu, masih banyak instansi bisnis maupun pemerintahan yang merasa terganggu dengan keberadaan peserta magang karena kompetensi mereka belum memenuhi kriteria pekerjaan yang tersedia. Faktor lain yang menjadi kendala adalah adanya dokumen serta data rahasia yang tidak dapat diakses oleh pihak luar. (Barnad & Tedjokusumo, 2023)

Link and match berawal dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2, terkait instruksi untuk mempersiapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tenaga siap kerja, yang kemudian menjadi dasar perancangan kebijakan *link and match*. Kemudian pada tahun 1993 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Wardiman Djojonegoro dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Abdul Latif, mencetuskan *link and match* yang bertujuan mencetak tenaga kerja mandiri dengan program Bersama. Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, diperlukan Pendidikan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri. Kebijakan *link and match* merupakan strategi penting untuk menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi, *life skills*, dan kapasitas sumber daya manusia agar lulusan pendidikan, terutama SMK, mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dan bersaing di tingkat global. Dengan pembekalan keterampilan kerja yang relevan, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terdidik sekaligus mendorong terciptanya tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan produktif. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia berkualitas di era globalisasi. (Precalya & Darwan, 2021)

Kebijakan *Link and Match* diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, yang menekankan revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri, termasuk penyusunan kurikulum bersama, pelaksanaan magang, serta sertifikasi kompetensi bagi siswa. Meskipun kebijakan ini telah diluncurkan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya keterlibatan industri dalam proses pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pasar kerja di kalangan pendidik.

Kebijakan *link and match* merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi Pendidikan kejuruan, khususnya Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan lulusan terdidik dengan cara menyelaraskan kurikulum Pendidikan dengan permintaan pasar kerja. Program *link and match* yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan vokasi dan dunia industri. Di bawah naungan Kementerian Perindustrian, Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMK-SMTI) Makassar diharapkan menjadi model pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di sektor industri.

Program *link and match* dalam dunia pendidikan diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Prof. Dr. Ing., dengan tujuan menyelaraskan dunia pendidikan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). Judissuseno (2008) mengemukakan konsep *link and match* yang menekankan adanya keterkaitan dan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Istilah *link* menggambarkan proses yang harus selaras dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan *match* menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, baik dari segi jumlah, kualitas, variasi, kualifikasi, maupun waktu. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan penting sebagai jembatan dalam implementasi *link and match*, terutama melalui sistem pendidikan ganda yang mereka terapkan. Dengan demikian, lulusan SMK diharapkan dapat meningkatkan penguasaan keterampilan dan kompetensi yang relevan serta berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan *link and match* semakin strategis dalam memperkuat hubungan kolaboratif antara SMK dan DUDI, terutama dalam mendekatkan proses pembelajaran siswa dengan lingkungan bisnis dan industri. (Maulina & Yoenanto, 2022)

Kebijakan *link and match* merupakan suatu kebijakan yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan secara umum serta dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan industri secara khusus. Kebijakan ini menjadi bagian dari empat tema utama kebijakan pendidikan nasional, yaitu pemerataan kesempatan, peningkatan relevansi, serta peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, relevansi pendidikan mengacu pada upaya menciptakan hubungan yang erat dan kesesuaian antara sistem pendidikan dan perkembangan yang terjadi di berbagai sektor. Dengan adanya *link and match*, lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat terserap lebih optimal dalam

dunia usaha dan industri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993). Konsep *link and match* tidak hanya sekadar menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja, tetapi juga menekankan pentingnya kesetaraan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Implementasi konsep ini dilakukan melalui kerja sama antara industri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia. Setiap SMK dapat menjalin kemitraan dengan beberapa industri dengan mempertimbangkan keselarasan antara program keahlian yang diajarkan di sekolah dengan bidang industri yang relevan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh teori di bangku sekolah, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih erat antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga lulusan SMK memiliki keterampilan yang lebih aplikatif dan siap bersaing di dunia industri. Selain itu, kerja sama yang erat antara sekolah dan industri juga dapat menciptakan peluang bagi siswa untuk mendapatkan pelatihan, magang, bahkan kesempatan kerja setelah mereka lulus. Dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan ini, baik institusi pendidikan maupun industri dapat berkembang bersama, menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Studi kasus ini secara khusus berfokus pada SMK - SMTI Makassar sebagai representasi dari sekolah vokasi yang berupaya menerapkan kebijakan *Link and Match* dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia industri. SMK SMTI Makassar telah menjalin kerjasama dengan berbagai industri, termasuk PT Mayora Indah Tbk, PT *Panasonic Manufacturing* Indonesia, PT Semen Tonasa, PT Mahajaya Plastisindo Indonesia, *Ocean Medika* Indonesia, dan banyak lainnya. Kerjasama ini mencakup berbagai kegiatan seperti Praktek Kerja Industri (PKI), kunjungan industri, dan program seperti *Mayora Academy*. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kerja sama antara SMK dan industri dapat tercapai, serta bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi kebijakan ini, baik dari sisi sekolah maupun dari perspektif industri. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan *Link and Match*, serta

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut di masa mendatang. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi internal sekolah seperti keterbatasan sumber daya, kesesuaian materi ajar dengan kebutuhan industri, maupun dari sisi eksternal seperti kurangnya komitmen berkelanjutan dari pihak industri dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, belum meratanya pemahaman serta pelibatan semua pihak dalam proses implementasi juga menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal.

Lebih lanjut, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait kebijakan *link and match*. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi perbandingan yang penting untuk mendukung analisis dalam penelitian ini sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Lamijan dkk (2024), berjudul “Implementasi Program IDUKA (*Link and Match*) di Sekolah Menengah Kejuruan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Program IDUKA (*Link and Match*) di SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Ngawi sudah berjalan dengan baik namun memerlukan beberapa perbaikan untuk dapat meningkatkan efektivitas dari Program IDUKA (*Link and Match*). Seperti, melakukan identifikasi kebutuhan pada industri sebelum pelaksanaan program, melakukan analisis waktu pelaksanaan program agar siswa dapat memperoleh kompetensi yang lebih memadai dan pengalaman yang lebih banyak, serta melakukan komunikasi dengan industri yang lebih intensif dan lebih efektif (Lamijan et al., 2024).

Penelitian lain tentang kebijakan *link and match* dilakukan oleh Milandah Maulina dan Nono Hery Yoenanto (2022) dengan judul “Optimalisasi *Link and Match* sebagai Upaya Relevansi SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *link and match* merupakan program yang bertujuan untuk menjembatani hubungan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Dunia Usaha serta Dunia Industri (DUDI) agar tetap relevan dan saling menguntungkan. Program ini telah diterapkan di beberapa SMK dan terbukti membawa perbaikan dalam kualitas pendidikan dan kesiapan kerja lulusan. Beberapa SMK juga terus mempertahankan optimalisasi program *link and match* melalui berbagai pendekatan, seperti pelatihan berbasis kompetensi serta strategi yang meliputi perjanjian kerja sama (*Memorandum of Understanding* atau MoU) dengan DUDI, penyesuaian kurikulum, pelaksanaan praktik kerja industri (PRAKERIN), serta Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Dengan pengelolaan yang terstruktur dan sistematis, *link and match* dapat

berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat (Maulina & Yoenanto, 2022).

Penelitian oleh Mutiara Marina Damayanti dkk (2023) yang berjudul “Analisis Penerapan SMK Pusat Keunggulan di SMKN 4 Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kedua pihak, baik sekolah maupun industri, memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan program ini. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan aktif dari kedua belah pihak dapat memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara optimal. Jika program ini hanya dijalankan oleh salah satu pihak saja, maka implementasinya tidak akan berjalan secara maksimal dan belum dapat sepenuhnya diterapkan sesuai dengan harapan serta tujuan utama dari program tersebut. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama yang baik antara sekolah dan industri menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas serta keberlanjutan program ini. (Damayanti et al., 2023).

Penelitian oleh Muhammad Ibra Gholibi dkk (2024) dengan judul “*Link and Match Learning on the Quality of Vocational Graduates in Banten Province, Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran *link and match* perlu diterapkan di sekolah menengah kejuruan di Provinsi Banten, terutama untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. Pembelajaran *link and match* dinilai sebagai pembelajaran yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri, sehingga pembelajaran dengan menggunakan *link and match* yang dimodifikasi menjadi lebih asertif akan memberikan pengaruh yang lebih baik kepada lulusan kejuruan (Gholibi et al., 2024).

Penelitian oleh Ismaya Indri Astuti, Leo Agustino, dan Ayuning Budiati (2025) dengan judul “Kolaborasi Pelaksanaan Program *Link and Match* antara Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan Industri Petrokimia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum Dual System pada Politeknik Industri Petrokimia Banten yang menggabungkan pembelajaran teori dan praktik membantu mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep secara teoritis, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang memperdalam pemahaman mereka. Sistem ini sangat memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal, sebab Politeknik Industri Petrokimia Banten bekerjasama dengan industri untuk memanfaatkan fasilitas dan pengetahuan yang dimiliki oleh industri-industri petrokimia. Selain itu industri-industri petrokimia yang melakukan kolaborasi dengan Politeknik Industri Petrokimia Banten berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar, sementara industri mendapatkan manfaat dari

tenaga kerja yang terlatih, dan kedepannya tentunya industri akan mendapatkan tenaga kerja yang terlatih dan sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan (Astuti et al., 2025).

Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa *Link and Match* merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya identifikasi kebutuhan industri sebelum program dilaksanakan, kurangnya komunikasi intensif antara sekolah dan industri, serta belum optimalnya penyelarasan kurikulum dengan pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan industri dalam hal penyediaan infrastruktur, pengembangan tenaga pendidik, serta penguatan sistem magang dan sertifikasi kompetensi. Dengan strategi yang lebih terstruktur dan kolaboratif, kebijakan *Link and Match* dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan berdaya saing tinggi di dunia industri.

Untuk itu peneliti tertarik meneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan *Link And Match* Antara Sekolah Vokasi Dan Industri Di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Studi Kasus SMK - SMTI Makassar)**”

1.2 Tinjauan Teori

Implementasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang bermuara pada aktivitas nyata, yang mencakup adanya aksi, tindakan, atau mekanisme yang dijalankan dalam kerangka suatu sistem. Mekanisme ini mengandung makna bahwa implementasi bukan sekadar serangkaian aktivitas biasa, melainkan merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara sistematis, direncanakan dengan matang, dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan, pedoman, atau norma tertentu. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahapan penting dalam suatu proses kebijakan atau program yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran atau tujuan tertentu melalui langkah-langkah operasional yang konkret. Dalam kerangka kajian kebijakan publik, terdapat sejumlah teori yang membahas dan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai konsep implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut.:

a. George Edward III

Teori implementasi kebijakan menurut George Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh

empat variable utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur organisasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor kunci yang meliputi transmisi informasi yang jelas, akurat, dan konsisten kepada semua pihak terkait, termasuk pelaksana dan target sasaran kebijakan. Kejelasan dan keakuratan pesan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang memadai sangat penting agar implementasi berjalan efektif. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan sulit dilaksanakan secara optimal.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan motivasi pelaksana kebijakan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Dukungan dan sikap positif dari pelaksana meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan sistem birokrasi yang mendukung serta fleksibel membantu memperlancar proses pelaksanaan kebijakan.

Model ini menekankan bahwa keempat variabel tersebut harus berjalan secara simultan dan saling berinteraksi agar implementasi kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien. Menurut pandangan George Edward III, keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh keterpaduan dan sinergi dari keempat variabel utama yang ia kemukakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini harus saling mendukung dan bekerja secara harmonis satu sama lain agar kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan dengan baik dalam tindakan nyata di lapangan. Apabila terjadi ketidakseimbangan atau gangguan pada salah satu variabel—misalnya komunikasi yang tidak jelas, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen dari pelaksana, atau struktur birokrasi yang tidak mendukung—maka proses implementasi dapat menghadapi berbagai kendala serius yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Bahkan dalam kondisi tertentu, kegagalan dalam salah satu aspek tersebut dapat berdampak secara keseluruhan terhadap efektivitas implementasi, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai

dengan perencanaan awal dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.

b. Merilee S. Grindle

Teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Variabel-variabel yang termasuk dalam kategori konten kebijakan menurut Merilee S. Grindle mencakup berbagai aspek penting yang menentukan arah dan efektivitas implementasi suatu kebijakan. Salah satu aspek utama adalah sejauh mana kepentingan kelompok sasaran (*target group*) telah dimuat dan dipertimbangkan secara eksplisit dalam isi kebijakan tersebut, karena kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi kelompok sasaran berpotensi besar mengalami penolakan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Selain itu, jenis manfaat yang diharapkan akan diterima oleh kelompok sasaran juga menjadi pertimbangan penting, apakah manfaat tersebut bersifat langsung dan nyata atau lebih bersifat jangka panjang dan tidak langsung, karena hal ini akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program tersebut. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat atau derajat perubahan sosial, ekonomi, atau institusional yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut; semakin besar perubahan yang ditargetkan, maka semakin kompleks pula tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, letak program atau posisi pengambilan keputusan juga menjadi faktor penting, yaitu apakah kebijakan tersebut telah dirancang untuk dijalankan pada level pemerintahan yang paling sesuai dengan karakteristik permasalahan yang hendak diselesaikan. Kebijakan yang baik juga harus secara jelas dan rinci menyebutkan siapa saja pelaksana kebijakan (*implementor*) yang bertanggung jawab atas berbagai tahapan pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau tumpang tindih kewenangan di lapangan. Terakhir, keberadaan dan kecukupan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, dana, waktu, maupun sarana dan prasarana yang mendukung, juga merupakan unsur krusial dalam menentukan apakah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup kepentingan

yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan karakteristik Lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. (Bedha, 2024)

c. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn menurut Mulyadi tahun 2015 dalam (Handani & Siswara & Frinaldi, 2020). Teori kebijakan oleh Van Meter dan van Horn juga dikenal sebagai Model Proses Implementasi Kebijakan dan dikembangkan pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta. Dalam teorinya dijelaskan bahwa dalam pengimplementasian sebuah kebijakan publik kita harus memperhatikan 6 (Enam) variable yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Ukuran dan tujuan dari kebijakan harus jelas dan realistis agar dapat diukur tingkat keberhasilannya. Jika standar terlalu ideal, akan sulit untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terarah
- b. Para implementasi mengetahui sasaran dan tujuan kebijakan

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya non-manusia (seperti finansial dan waktu). Adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas pelaksana
- b. Sumber daya finansial

- c. Sumber daya sarana dan prasarana
3. Karakteristik agen pelaksana

Struktur birokrasi dan norma-norma dalam organisasi pelaksana mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Adapun indikatornya sebagai berikut:

 - a. Struktur birokrasi yang jelas
 - b. Prosedur atau pedoman yang menjadi standar
4. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Koordinasi dan Kerjasama antar instansi sangat penting untuk mendukung keberhasilan program implementasi. Adapun indikatornya sebagai berikut:

 - a. Komunikasi yang terjalin terkait implementasi kebijakan
 - b. Koordinasi atau Kerjasama yang dijalin oleh antar pihak
5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

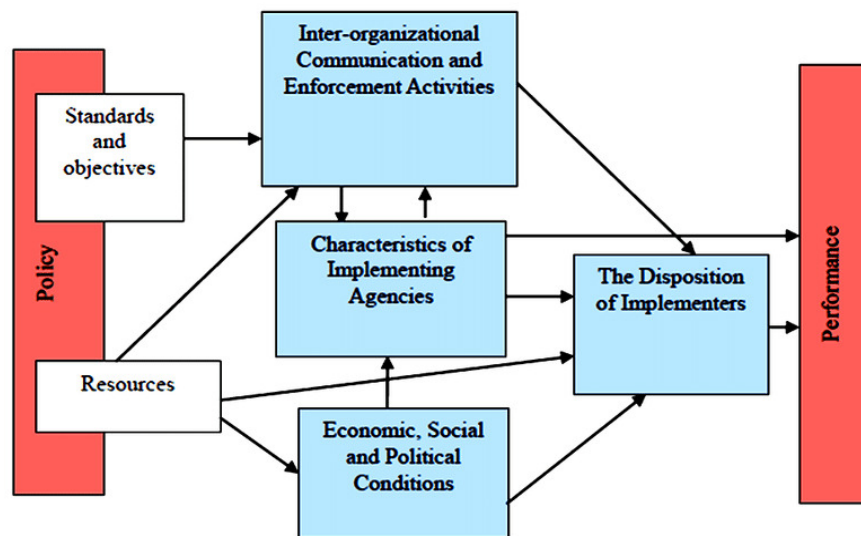
Faktor-faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kondisi yang diperlukan untuk implementasi yang sukses. Adapun indikatornya sebagai berikut

 - a. Pengaruh kondisi sosial terhadap implementasi kebijakan
 - b. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap implementasi kebijakan
 - c. Pengaruh kondisi politik terhadap implementasi kebijakan
6. Disposisi kecenderungan para pelaksana atau implementor

Disposisi atau respons dari para pelaksana terhadap kebijakan juga berperan penting dalam proses implementasi. Adapun indikatornya sebagai berikut:

 - a. Respon dan sikap implementor terhadap kebijakan
 - b. Motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan

Gambar 1.1 Bagan Teori Impelementasi Van Meter dan Van Horn



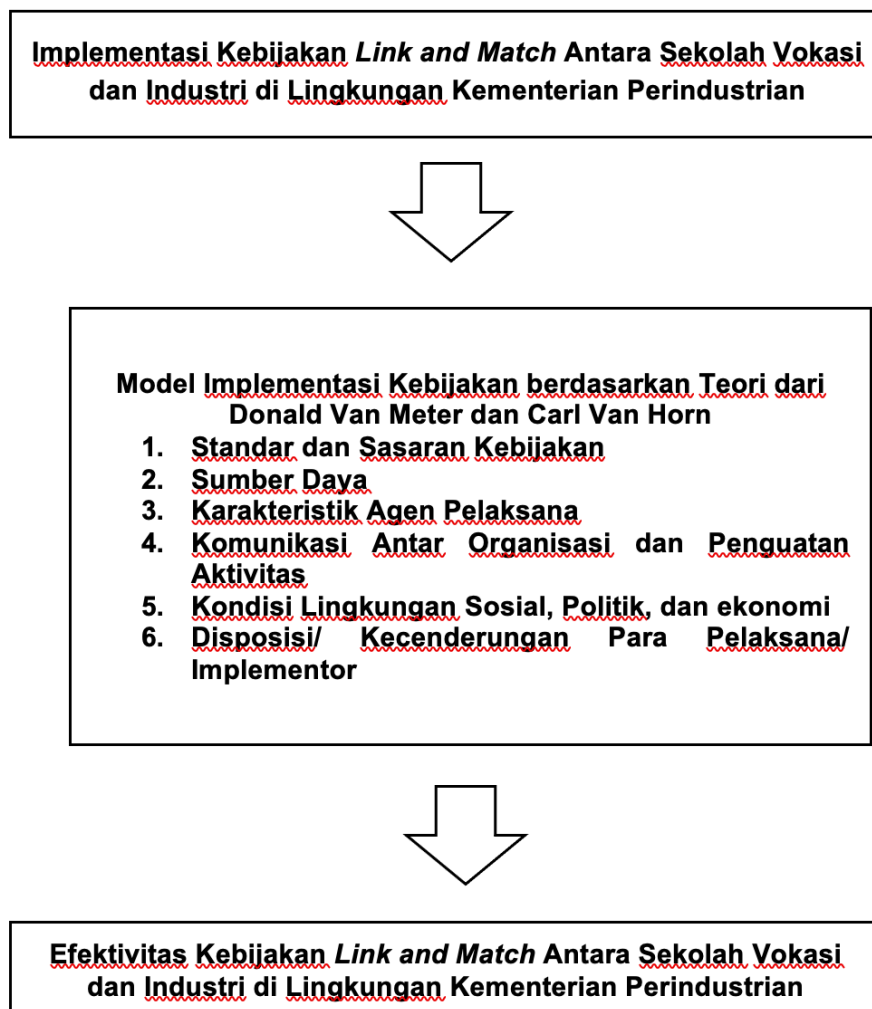
Sumber: <https://www.researchgate.net/figure/Policy-Implementation-According-to-Van-Meter-and-Van-Horn-Source-Van-Meter-dan-Van fig1 330659119>

Model ini mengasumsikan bahwa proses implementasi berjalan secara linear dari keputusan politik ke pelaksana, hingga hasil kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya memahami bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan dari suatu kebijakan. Dengan demikian, teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis dan memahami dinamika dalam implementasi kebijakan *Link and Match*. Memperhatikan variabel-variabel yang diidentifikasi dalam model ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan dari kebijakan pendidikan vokasi tersebut.

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn memberikan suatu kerangka kerja yang sistematis dan komprehensif dalam menganalisis serta memahami dinamika yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan *link and match*, khususnya dalam konteks pendidikan vokasi. Dengan memperhatikan berbagai variabel kunci yang diidentifikasi dalam model ini, seperti kejelasan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, keterlibatan pemangku kepentingan, komunikasi dan koordinasi antar lembaga, serta kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi jalannya kebijakan, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan *link and match* untuk lebih selaras dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja, sehingga lulusan pendidikan vokasi tidak hanya

memiliki keterampilan yang relevan dan aplikatif, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan global serta dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia.

Gambar 1.2 Kerangka Pikir



1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan *link and match* di SMK – SMTI Makassar serta menemukan berbagai faktor yang memengaruhi model kebijakan *link and match*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara teoritis maupun secara praktis, yaitu manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi segenap civitas akademika dalam

perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu Administrasi Publik pada kajian e-government.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki sekolah dalam implementasi kebijakan melalui indikator implementasi sehingga bisa menjadi bahan rujukan untuk perbaikan kedepannya.
- b. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai referensi, masukan, dan sumbangan pemikiran untuk SMK – SMTI Makassar dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan di sekolah menengah kejuruan.

BAB II METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian Analisis Implementasi Kebijakan *Link And Match* Antara Sekolah Vokasi Dan Industri Di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Studi Kasus SMK - SMTI Makassar) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Cresswel (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena social secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tujuan ini meliputi pemahaman tentang pengalaman individu, proses social, konteks budaya, interaksi, konstruksi makna, dan dinamika yang terjadi dalam fenomena tersebut (Ardiansyah et al., 2023)

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi. sehingga peneliti dapat menguraikan Analisis Implementasi Kebijakan *Link And Match* Antara Sekolah Vokasi Dan Industri Di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Studi Kasus SMK - SMTI Makassar).

1.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian jenis *case study* (studi kasus). Menurut Creswell (1998), studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Assyakurrohim et al., 2022).

Tipe studi kasus dalam penelitian ini yakni deksriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realitas yang terkait dengan Analisis Implementasi Kebijakan *Link And Match* Antara Sekolah Vokasi Dan Industri Di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Studi Kasus Smk - Smti Makassar).

1.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dapat menjadi sumber informasi berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun informan itu berasal dari stakeholder terkait

yang dapat memberikan gambaran informasi yang akurat terkait masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua PDSI (Reny Febriani Tulenan, S.T.)
2. Pembimbing PDSI (Wiska, S.S.,M.Pd.)
3. Siswa PDSI (Muhammad Gayus Abbas)
4. Lulusan / alumni PDSI (Dzakiy Mubarkah)
5. Pihak Industri (Muhammad Sultan, S.T. – PT. Bosowa Beton & Muhammad Hadiansyah, S.T.,M.T. – WWTP Kima Makassar)

2.3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperoleh dari sumber utama secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara maupun melalui observasi secara mandiri. Informasi yang di dapatkan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada informan yang paham terkait dengan kebijakan *link and match* di SMK – SMTI.

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan. Data ini berupa data yang dipublikasikan kepada pihak lain, dalam arti data tersebut siapa saja dapat menggunakannya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil literatur melalui bahan kepustakaan seperti dokumen, literatur, maupun arsip dari SMK – SMTI Makassar. Data sekunder ini merupakan penunjang dari data yang telah didapatkan dari data primer

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Rita Fiantika et al., 2022 terdapat empat bentuk instrument dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, trigulasi/gabungan. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Ketiga teknik ini yang sangat efektif dalam pengumpulan data di lapangan. Ketiga teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui tanya jawab, sehingga

dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan atau keyakinan pribadi dari yang di wawancarai. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan jawaban informan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data dengan mengamati secara teliti peristiwa, perilaku, interaksi, atau objek yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tanpa terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap diantara dua metode lainnya yaitu observasi dan wawancara. Dalam teknik ini, peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dalam bentuk visual atau foto yang berkaitan dengan implementasi kebijakan *link and match*. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program prakerin dan kebijakan *link and match* di SMK – SMTI Makassar. Dokumen tersebut meliputi pedoman prakerin, surat keputusan, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan melalui pengambilan gambar secara langsung di lokasi penelitian sebagai bukti visual kegiatan dan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

2.3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggambarkan fakta atau kejadian yang ada di lapangan dalam bentuk kalimat berdasarkan informasi yang diperoleh

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas, sehingga datanya sudah jenuh aktifitas dalam analisis data (Safarudin et al., 2023). Langkah-langkah analisis data penelitian tersebut diantaranya:

a. *Data Collection* / Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Dalam hal ini peneliti menjelajah secara umum untuk mendapatkan data yang lebih banyak terhadap obyek yang diteliti sehingga data didapatkan lebih banyak dan bervariasi.

b. *Data Reduction* / Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Artinya data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci kemudian dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

c. *Data Display* / Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan. Antara kategori *flowcart* dan sejenisnya.

d. *Conclusion drawing and Verification* / Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan awal sifatnya masih sementara dan akan mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

2.3.5 Validitas dan Realibilitas

a. Validitas

Validitas data kualitatif merujuk pada sejauh mana temuan penelitian mencerminkan kenyataan atau kebenaran yang sebenarnya dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, validitas dicapai dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perspektif, pengalaman, dan konteks dari partisipan. Salah satu cara untuk meningkatkan validitas adalah dengan menggunakan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau teori untuk memverifikasi dan memperkuat temuan. Hal ini membantu mengurangi bias

dan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, member checking atau pemeriksaan oleh partisipan juga dapat digunakan untuk memastikan validitas. Dalam teknik ini, peneliti mengonfirmasi hasil wawancara atau observasi dengan partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman mereka. Validitas data kualitatif juga bergantung pada keterampilan peneliti dalam melakukan pengamatan yang jeli, mengajukan pertanyaan yang tepat, serta mampu memahami nuansa sosial dan budaya yang mendasari fenomena yang dipelajari. Dengan demikian, validitas dalam penelitian kualitatif lebih terkait dengan keakuratan interpretasi dan kesesuaian data dengan konteks penelitian daripada sekadar pengukuran numerik atau statistik. (Creswell & Creswell, 2018)

b. Realibilitas

Reliabilitas data kualitatif mengacu pada konsistensi dan ketepatan dalam pengumpulan serta analisis data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas dapat dicapai dengan memastikan bahwa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, dilakukan secara konsisten di berbagai situasi atau partisipan. Penggunaan teknik seperti keterlibatan yang berkepanjangan dan pengamatan yang terus-menerus membantu peneliti dalam memahami konteks secara mendalam dan mencegah bias yang mungkin muncul. Selain itu, teknik triangulasi, di mana data dibandingkan dari berbagai sumber atau metode, memperkuat reliabilitas dengan mengurangi kemungkinan adanya interpretasi yang keliru. Untuk meningkatkan reliabilitas, peneliti juga dapat menggunakan pencatatan yang rinci dan prosedur yang transparan, sehingga memungkinkan penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks yang sama atau serupa. Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak selalu diharapkan untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi secara luas, konsistensi dalam proses pengumpulan dan analisis data sangat penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Peneliti harus berusaha untuk menjaga obyektivitas dan kejelasan dalam interpretasi, meskipun bekerja dalam ranah yang sering kali kaya akan nuansa dan subjektivitas. (Al Hakim et al., 2021)